Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)
Volume : 06 | Nomor 03 | November 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n3.9727

Pengaruh Investasi, PDRB Per Kapita, dan Sektor Perdagangan dan Industri terhadap Tax Ratio

Penulis:
Edi Gunawan[1]
Eddy Suratman[2]
Wahyudi[3]
Windhu Putra[4]
Hayet[5]

Afiliasi:
Universitas Tanjungpura[12345]

Korespondensi:
edi_g23@yahoo.co.id

Histori Naskah:
Submit: 03-10-2026
Accepted: 19-10-2026
Published: 01-11-2026

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi, PDRB per kapita, serta sektor perdagangan dan industri terhadap tax ratio kabupaten/kota di Kalimantan Barat tahun 2021–2025. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel menggunakan 70 observasi dari 14 kabupaten/kota selama periode 2021–2025. Pemilihan model terbaik dilakukan melalui uji Chow dan uji Hausman, dengan hasil menunjukkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) merupakan model yang paling sesuai digunakan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax ratio, sedangkan PDRB per kapita berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tax ratio. Sementara itu, sektor perdagangan dan industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax ratio kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Secara simultan, investasi, PDRB per kapita, serta sektor perdagangan dan industri berpengaruh signifikan terhadap tax ratio dengan kemampuan menjelaskan variasi perubahan tax ratio sebesar 99,89 persen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan penerimaan pajak daerah di Kalimantan Barat perlu diarahkan pada pengembangan investasi produktif dan peningkatan aktivitas sektor perdagangan serta industri, disertai dengan optimalisasi administrasi perpajakan agar potensi ekonomi daerah dapat dikonversi menjadi penerimaan pajak secara lebih optimal.

Kata kunci: Investasi, PDRB Per Kapita, Sektor Perdagangan dan Industri, Tax Ratio.

Pendahuluan

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Dalam konteks tersebut, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah, menjadi salah satu indikator penting dalam melihat kapasitas fiskal dan tingkat kemandirian daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan daerah dalam mengonversi aktivitas ekonomi menjadi penerimaan pajak adalah tax ratio daerah, yaitu perbandingan antara penerimaan pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Mardiasmo, 2018; Noviyanti & Zen, 2022).

Tax ratio daerah memberikan gambaran mengenai sejauh mana aktivitas ekonomi yang tercermin dalam PDRB mampu menghasilkan penerimaan pajak bagi pemerintah daerah. Semakin

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 03 | November 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n3.9727

tinggi nilai tax ratio menunjukkan semakin besar proporsi aktivitas ekonomi regional yang berhasil dikonversi menjadi penerimaan pajak daerah. Namun, tingginya aktivitas ekonomi tidak selalu secara langsung meningkatkan penerimaan pajak karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti struktur ekonomi daerah, karakteristik sektor usaha, cakupan objek pajak daerah, kepatuhan wajib pajak, serta efektivitas administrasi perpajakan (Bird & Zolt, 2014; Noviyanti & Zen, 2022).

Penguatan kemampuan perpajakan daerah semakin relevan setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Regulasi tersebut menekankan penguatan local taxing power, yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber penerimaan perpajakan daerah secara optimal. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal melalui pengelolaan potensi ekonomi daerah yang lebih efektif (Republik Indonesia, 2022).

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi tax ratio daerah adalah investasi. Investasi berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan kegiatan ekonomi baru, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong perkembangan sektor perdagangan dan jasa. Peningkatan aktivitas ekonomi akibat investasi secara teoritis dapat memperluas basis pajak melalui bertambahnya jumlah pelaku usaha maupun transaksi ekonomi. Namun demikian, investasi tidak selalu menghasilkan peningkatan tax ratio secara langsung karena tidak seluruh kegiatan investasi menjadi objek pajak daerah dan manfaat fiskalnya bergantung pada karakteristik investasi serta struktur ekonomi wilayah tersebut (Todaro & Smith, 2020; Pramanda et al., 2023).

Selain investasi, indikator lain yang berkaitan dengan kemampuan perpajakan daerah adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita menggambarkan rata-rata nilai tambah ekonomi yang dihasilkan setiap penduduk dalam suatu wilayah. Peningkatan PDRB per kapita dapat menunjukkan meningkatnya kapasitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha sehingga secara teoritis berpotensi meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Akan tetapi, peningkatan PDRB per kapita belum tentu sepenuhnya meningkatkan penerimaan pajak daerah karena bergantung pada struktur ekonomi dan jenis aktivitas ekonomi yang berkembang di wilayah tersebut (Badan Pusat Statistik, 2025; Musgrave & Musgrave, 1989).

Kalimantan Barat menjadi wilayah yang menarik untuk dikaji karena memiliki karakteristik ekonomi yang beragam antar kabupaten/kota. Aktivitas ekonomi daerah ini mencakup sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, transportasi, dan jasa. Perbedaan struktur ekonomi tersebut menyebabkan adanya variasi kapasitas ekonomi serta potensi penerimaan pajak antarwilayah (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2025).

Berdasarkan data awal penelitian, terdapat perbedaan tingkat tax ratio antar kabupaten/kota di Kalimantan Barat selama periode 2021–2025. Pada tahun 2025, Kota Pontianak memiliki tax ratio sebesar 4,20 persen, sedangkan Kabupaten Melawi sebesar 1,05 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa wilayah dengan aktivitas ekonomi yang lebih besar belum tentu memiliki pola kemampuan perpajakan yang sama dengan daerah lainnya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya analisis terhadap faktor ekonomi yang menyebabkan variasi kemampuan perpajakan antarwilayah (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2025; Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025).

Selain investasi dan PDRB per kapita, penelitian ini juga mempertimbangkan sektor perdagangan dan industri sebagai faktor yang berpotensi memengaruhi tax ratio. Kedua sektor tersebut memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas produksi, distribusi, konsumsi, serta transaksi

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 03 | November 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n3.9727

ekonomi masyarakat. Wilayah dengan kontribusi sektor perdagangan dan industri yang lebih besar secara teoritis memiliki basis ekonomi yang lebih luas sehingga berpotensi menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi (Kuncoro, 2018).

Perbedaan kemampuan perpajakan antarwilayah juga terlihat dari variasi struktur ekonomi daerah. Kota Pontianak memiliki kontribusi perdagangan dan industri yang relatif tinggi, sedangkan beberapa kabupaten memiliki kontribusi sektor tersebut yang lebih rendah. Perbedaan karakteristik tersebut dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mengubah aktivitas ekonomi menjadi penerimaan pajak karena basis pajak daerah sangat dipengaruhi oleh sektor ekonomi dominan di masing-masing wilayah (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2025).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara faktor ekonomi dan kinerja perpajakan daerah masih menghasilkan temuan yang beragam. Rafsanjani dan Agustina (2022) menemukan bahwa faktor ekonomi dan fiskal memiliki hubungan yang berbeda terhadap tax ratio antarprovinsi di Indonesia. Sementara itu, Pramanda et al. (2023) menemukan bahwa investasi berpengaruh positif signifikan terhadap tax effort, sedangkan PDRB per kapita tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya empirical gap yang perlu dikaji lebih lanjut berdasarkan karakteristik wilayah yang berbeda.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat pertanyaan penting mengenai faktor yang menyebabkan perbedaan tax ratio antar kabupaten/kota di Kalimantan Barat ketika investasi, PDRB per kapita, serta struktur perdagangan dan industri mengalami perkembangan. Permasalahan tersebut tidak cukup dijelaskan melalui pendekatan deskriptif, tetapi memerlukan pengujian empiris menggunakan analisis ekonometrika. Penggunaan data panel memungkinkan penelitian mengidentifikasi variasi antarwilayah sekaligus perubahan antarwaktu secara lebih komprehensif (Gujarati & Porter, 2021).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi, PDRB per kapita, serta sektor perdagangan dan industri terhadap tax ratio kabupaten/kota di Kalimantan Barat tahun 2021–2025. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai faktor ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak serta memperkuat local taxing power sebagai bagian dari implementasi desentralisasi fiskal (Republik Indonesia, 2022).

Studi Literatur

Teori Federalisme

Teori federalisme fiskal digunakan untuk menjelaskan batas kelembagaan hubungan tersebut. Oates (1999) menempatkan pembagian fungsi dan instrumen fiskal antartingkat pemerintahan sebagai persoalan utama dalam penyelenggaraan desentralisasi. Dalam penelitian ini, implikasinya adalah bahwa aktivitas ekonomi di suatu wilayah tidak seluruhnya menjadi basis penerimaan pemerintah kabupaten/kota. Pengaruh perkembangan ekonomi terhadap tax ratio daerah bergantung pada kesesuaian kegiatan tersebut dengan kewenangan pemungutan yang dimiliki. Dengan demikian, kerangka kapasitas perpajakan menjelaskan potensi ekonominya, sedangkan teori federalisme fiskal menjelaskan mengapa potensi tersebut tidak selalu menghasilkan penerimaan pajak daerah secara proporsional (Oates, 1999).

Tax Ratio Daerah

Penelitian ini menggunakan kerangka kapasitas perpajakan (taxable capacity) sebagai landasan utama untuk menjelaskan hubungan antara karakteristik ekonomi daerah dan tax ratio.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 03 | November 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n3.9727

Bahl (1971) membedakan kapasitas perpajakan, yaitu kemampuan potensial suatu perekonomian dalam menghasilkan penerimaan pajak, dari upaya perpajakan (tax effort), yaitu tingkat pemanfaatan kapasitas tersebut. Dalam kerangka ini, perbedaan tax ratio tidak semata-mata mencerminkan keberhasilan pemungutan pajak, tetapi juga berkaitan dengan perbedaan kondisi ekonomi yang membentuk basis perpajakan. Oleh karena itu, tax ratio yang lebih rendah belum tentu menunjukkan upaya pemungutan yang lebih lemah apabila kapasitas ekonomi dan cakupan basis pajaknya juga berbeda (Bahl, 1971).

Kerangka kapasitas perpajakan memberikan dasar akademis bagi penggunaan variabel ekonomi dalam model penelitian. Tingkat pembangunan dan struktur perekonomian dapat memengaruhi besarnya potensi penerimaan yang tersedia. Dalam penelitian ini, investasi diposisikan sebagai faktor pengembangan basis ekonomi, PDRB per kapita sebagai indikator kapasitas ekonomi rata-rata, serta kontribusi perdagangan dan industri sebagai indikator komposisi kegiatan ekonomi. Pemilihan tersebut merupakan adaptasi kerangka kapasitas perpajakan pada konteks kabupaten/kota, sehingga hubungan yang diperkirakan tetap harus mempertimbangkan karakteristik kewenangan pajak daerah (Le et al., 2012).

Investasi dan Pengembangan Basis Perpajakan

Berdasarkan kerangka tersebut, investasi diperkirakan berkaitan dengan tax ratio melalui pengembangan kegiatan usaha dan aktivitas ekonomi turunannya. Penambahan investasi dapat memperbesar kapasitas produksi, penggunaan aset, serta permintaan terhadap barang dan jasa yang berpotensi memperluas basis pajak daerah. Dukungan empiris terhadap hubungan positif investasi dengan indikator perpajakan ditemukan oleh Pramanda et al. (2023) pada kabupaten/kota di Jawa Barat. Namun, penelitian tersebut menggunakan tax effort, sehingga hasilnya diperlakukan sebagai pembanding dan tidak disamakan langsung dengan pengukuran tax ratio dalam penelitian ini (Pramanda et al., 2023).

Hubungan positif investasi dengan tax ratio bersifat kondisional. Investasi dapat meningkatkan PDRB lebih cepat daripada penerimaan pajak daerah, terutama ketika kegiatan yang berkembang memiliki keterkaitan terbatas dengan objek pajak daerah. Oleh karena itu, peningkatan investasi diperkirakan menaikkan tax ratio apabila pertumbuhan penerimaan pajak yang menyertainya lebih besar secara proporsional daripada pertumbuhan PDRB. Argumentasi ini menempatkan investasi sebagai faktor pengembangan potensi pajak yang pengaruh aktualnya bergantung pada keterjangkauan basis ekonomi oleh kewenangan perpajakan daerah (Bahl, 1971; Oates, 1999).

PDRB Per Kapita dan Kapasitas Ekonomi Daerah

PDRB per kapita digunakan untuk merepresentasikan tingkat kapasitas ekonomi rata-rata suatu wilayah. Dalam kerangka kapasitas perpajakan, perkembangan ekonomi dapat memperluas sumber daya yang berpotensi dikenai pajak. Namun, PDRB per kapita bukan ukuran langsung pendapatan yang diterima setiap penduduk, sehingga peningkatannya tidak otomatis menunjukkan peningkatan kemampuan membayar pajak seluruh masyarakat. Hubungan positif dengan tax ratio diperkirakan muncul apabila peningkatan kapasitas ekonomi diikuti perluasan kegiatan yang relevan dengan basis pajak daerah. Dengan demikian, arah hubungan yang diharapkan perlu dibedakan dari kepastian pengaruh empirisnya (Le et al., 2012).

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 03 | November 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n3.9727

Struktur Perdagangan dan Industri serta Keterjangkauan Basis Pajak

Kontribusi perdagangan dan industri digunakan untuk menangkap perbedaan struktur ekonomi antardaerah. Dalam pengembangan model ini, perubahan komposisi sektoral diperkirakan memengaruhi jenis kegiatan usaha, transaksi, dan penggunaan aset yang berpotensi terkait dengan penerimaan pajak daerah. Akan tetapi, besarnya kontribusi kedua sektor tidak dapat langsung disamakan dengan besarnya objek pajak kabupaten/kota. Hubungan positif diperkirakan terjadi ketika perkembangan sektor tersebut memperluas basis pajak yang berada dalam kewenangan daerah. Penggabungan kedua sektor dalam satu indikator juga membatasi interpretasi pada kontribusi gabungannya, bukan pengaruh masing-masing sektor secara terpisah (Le et al., 2012; Oates, 1999).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel untuk menganalisis pengaruh investasi, PDRB per kapita, serta sektor perdagangan dan industri terhadap tax ratio kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021–2025. Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk panel yang terdiri atas 14 kabupaten/kota selama periode lima tahun, sehingga menghasilkan 70 observasi penelitian. Data penelitian diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), serta sumber resmi terkait lainnya. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tax ratio daerah yang dihitung berdasarkan rasio penerimaan pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sedangkan variabel independennya meliputi investasi, PDRB per kapita, serta kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap PDRB. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel melalui tiga pendekatan model, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Pemilihan model terbaik dilakukan melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM). Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial (t-test), uji simultan (F-test), serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan tax ratio kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

Hasil

Penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri atas data 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2021–2025, sehingga diperoleh sebanyak 70 observasi penelitian. Variabel dependen yang digunakan adalah tax ratio daerah, sedangkan variabel independen meliputi investasi, PDRB per kapita, serta kontribusi sektor perdagangan dan industri.

Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak pengolah statistik. Sebelum melakukan estimasi model, penelitian ini terlebih dahulu melakukan beberapa tahapan pengujian untuk menentukan model regresi terbaik yang digunakan.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian yang meliputi nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Analisis ini dilakukan untuk melihat variasi data tax ratio, investasi, PDRB per kapita, serta sektor perdagangan dan industri pada 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat selama periode 2021–2025. Berdasarkan hasil pengolahan data, penelitian ini menggunakan sebanyak 70 observasi.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 03 | November 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n3.9727

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Maximum	Minimum	Std. Dev
Tax Ratio (Y)	1,650,857	4,200,000	0,680000	0,831363
Investasi (X1)	3,178,043	9,658,000	1,058,000	1,905,320
PDRB Per Kapita (X2)	4,640,571	8,080,000	2,430,000	1,300,138
Sektor Perdagangan dan Industri (X3)	1,668,286	4,850,000	6,500,000	1,054,543

Sumber: Hasil Pengolahan Data EViews (2026)

Berdasarkan Tabel 1, variabel tax ratio memiliki nilai rata-rata sebesar 1,650857 persen dengan nilai tertinggi sebesar 4,20 persen dan nilai terendah sebesar 0,68 persen. Hal tersebut menunjukkan adanya variasi kemampuan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat dalam mengonversi aktivitas ekonomi menjadi penerimaan pajak daerah.

Variabel investasi memiliki nilai rata-rata sebesar 317,8043 miliar rupiah dengan nilai maksimum sebesar 965,8 miliar rupiah dan minimum sebesar 105,8 miliar rupiah. Sementara itu, PDRB per kapita memiliki rata-rata sebesar 46,40571 dengan nilai maksimum sebesar 80,8 dan minimum sebesar 24,3. Variabel sektor perdagangan dan industri memiliki rata-rata kontribusi sebesar 16,68286 persen dengan nilai maksimum sebesar 48,5 persen dan minimum sebesar 6,5 persen.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model regresi yang paling sesuai antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM). Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan nilai probabilitas Cross-section Chi-square. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka model yang digunakan adalah Fixed Effect Model.

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	Probabilitas
Cross-section F	53,701,164	0,0000
Cross-section Chi-square	185,588,692	0,0000

Sumber: Hasil Pengolahan Data EViews (2026)

Hasil Uji Chow menunjukkan nilai probabilitas Cross-section Chi-square sebesar 0,0000 < 0,05. Dengan demikian, H0 ditolak dan H1 diterima sehingga model yang lebih tepat digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM) dibandingkan Common Effect Model.

Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model terbaik antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Dasar pengambilan keputusan menggunakan nilai probabilitas Cross-section Random, dimana nilai probabilitas < 0,05 menunjukkan bahwa model FEM lebih tepat digunakan.

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq Statistic	Probabilitas
Cross-section Random	19,497,222	0,0002

Sumber: Hasil Pengolahan Data EViews (2026)

Berdasarkan hasil Uji Hausman, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0002 < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model yang paling sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM). Dengan demikian, estimasi regresi selanjutnya menggunakan pendekatan Fixed Effect Model.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi telah berdistribusi normal. Pengujian dilakukan menggunakan nilai probabilitas Jarque-Bera dengan kriteria apabila probabilitas lebih besar dari 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 03 | November 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n3.9727

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Jarque-Bera	Probability
0,561169	0,755342

Sumber: Hasil Pengolahan Data EViews (2026)

Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,755342 > 0,05. Dengan demikian, residual model penelitian telah memenuhi asumsi normalitas atau dapat dikatakan data penelitian berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan korelasi yang tinggi antarvariabel independen. Model dikatakan terbebas dari masalah multikolinearitas apabila nilai korelasi antarvariabel independen berada di bawah 0,80.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	X1	X2	X3
Investasi (X1)	1,000,000	0,667017	0,533423
PDRB Per Kapita (X2)	0,667017	1,000,000	0,276912
Perdagangan dan Industri (X3)	0,533423	0,276912	1,000,000

Sumber: Hasil Pengolahan Data EViews (2026)

Hasil awal menunjukkan adanya korelasi yang tinggi antarvariabel independen. Oleh karena itu dilakukan transformasi diferensiasi data. Setelah dilakukan pengujian ulang, seluruh nilai korelasi berada di bawah 0,80 sehingga model penelitian dinyatakan telah terbebas dari masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual dalam model penelitian. Model dinyatakan bebas heteroskedastisitas apabila nilai probabilitas masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Probabilitas
Investasi (X1)	0,3875
PDRB Per Kapita (X2)	0,2875
Perdagangan dan Industri (X3)	0,1356

Sumber: Hasil Pengolahan Data EViews (2026)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, model regresi penelitian tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan residual antarperiode dalam model regresi. Pengujian dilakukan menggunakan nilai Durbin-Watson.

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Watson	Nilai DL	Nilai DU
2,000,779	15,205	17,015

Sumber: Hasil Pengolahan Data EViews (2026)

Nilai Durbin-Watson sebesar 2,000779 berada di antara nilai DU dan 4-DU, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi telah terbebas dari masalah autokorelasi.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap tax ratio. Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model, penelitian ini menggunakan Fixed Effect Model sebagai model estimasi akhir. Berikut hasil estimasi pengaruh investasi, PDRB per kapita, serta sektor perdagangan dan industri terhadap tax ratio.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 03 | November 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n3.9727

Tabel 8. Hasil Regresi Fixed Effect Model

Variabel	Koefisien	t-Statistic	Probabilitas
C	-0,047102	-0,218597	0,8278
Investasi (X1)	0,002382	8,433,013	0,0000
PDRB Per Kapita (X2)	0,002493	0,842361	0,4034
Perdagangan dan Industri (X3)	0,049461	2,562,784	0,0133

Berdasarkan hasil estimasi FEM, variabel investasi memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 < 0,05 dengan koefisien sebesar 0,002382. Hal ini menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax ratio. Artinya, peningkatan investasi cenderung meningkatkan tax ratio kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

Variabel PDRB per kapita memiliki nilai probabilitas sebesar 0,4034 > 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap tax ratio. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PDRB per kapita belum secara langsung mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Sementara itu, variabel sektor perdagangan dan industri memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0133 < 0,05 dengan koefisien positif sebesar 0,049461. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sektor perdagangan dan industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax ratio. hasil_edi

Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap tax ratio.

Tabel 9. Hasil Uji F

F-statistic	Prob(F-statistic)
4,240,650	0,000000

Sumber: Hasil Pengolahan Data EViews (2026)

Nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,000000 < 0,05 menunjukkan bahwa investasi, PDRB per kapita, serta sektor perdagangan dan industri secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tax ratio kabupaten/kota di Kalimantan Barat. hasil_edi

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen.

Tabel 10. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Root MSE	0.02306	R-squared	0.999219
Mean dependent var	1.650857	Adjusted R-squared	0.998984
S.D. dependent var	0.831363	S.E. of regression	0.026501
Akaike info criterion	-4.215724	Sum squared resid	0.037223
Schwarz criterion	-3.669661	Log likelihood	164.5503
Hannan-Quinn criter.	-3.998821	F-statistic	4240.65
Durbin-Watson stat	2.000779	Prob(F-statistic)	0.0000

Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,998984 menunjukkan bahwa variabel investasi, PDRB per kapita, dan sektor perdagangan dan industri mampu menjelaskan variasi tax ratio sebesar 99,89%, sedangkan sisanya sebesar 0,11% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Investasi terhadap Tax Ratio Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 03 | November 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n3.9727

Hasil estimasi menunjukkan bahwa investasi memiliki koefisien positif sebesar 0,002382 dengan nilai probabilitas kurang dari 0,0001. Dengan demikian, investasi berhubungan positif dan signifikan dengan tax ratio kabupaten/kota di Kalimantan Barat pada periode penelitian. Dalam kerangka kapasitas perpajakan, hubungan tersebut dapat dipahami melalui peran investasi dalam mengembangkan basis ekonomi yang berpotensi menghasilkan penerimaan pajak. Investasi dapat memperluas kegiatan usaha dan meningkatkan aktivitas ekonomi turunannya sehingga tersedia lebih banyak potensi penerimaan yang dapat dijangkau pemerintah daerah. Karena variabel dependen berbentuk rasio, hasil positif ini mengindikasikan bahwa investasi yang lebih tinggi berkaitan dengan penerimaan pajak yang relatif lebih besar terhadap ukuran perekonomian, bukan sekadar peningkatan penerimaan pajak secara nominal. Penafsiran ini sejalan dengan pandangan bahwa tax ratio berkaitan dengan kondisi ekonomi pembentuk kapasitas perpajakan, meskipun tidak secara langsung mengukur tingkat pemanfaatan kapasitas tersebut (Bahl, 1971).

Teori federalisme fiskal memperjelas bahwa hubungan investasi dengan penerimaan daerah bergantung pada pembagian kewenangan perpajakan antartingkat pemerintahan. Investasi yang berlangsung di suatu kabupaten/kota tidak seluruhnya menghasilkan penerimaan pajak bagi pemerintah daerah tersebut. Oleh karena itu, hubungan positif yang ditemukan dapat ditafsirkan sebagai indikasi adanya keterkaitan antara perkembangan investasi dan aktivitas ekonomi yang relevan dengan basis pajak kabupaten/kota. Namun, model penelitian belum mengidentifikasi jenis investasi maupun saluran penerimaan yang mendasarinya, sehingga hasil ini tidak membuktikan bahwa setiap bentuk investasi memberikan manfaat perpajakan daerah yang sama. Teori federalisme fiskal digunakan untuk menjelaskan kondisi kelembagaan yang memungkinkan hubungan tersebut terjadi, sekaligus membatasi generalisasi hasilnya (Oates, 1999).

Temuan ini memiliki kesesuaian arah dengan penelitian Pramanda et al. (2023), yang menemukan hubungan positif dan signifikan antara investasi dan tax effort pada kabupaten/kota di Jawa Barat. Meskipun demikian, kesesuaian tersebut perlu dibaca dengan mempertimbangkan perbedaan indikator dependen karena tax ratio tidak identik dengan tax effort. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya memperhatikan keterkaitan investasi dengan basis pajak daerah, bukan hanya besarnya nilai investasi yang masuk. Pemerintah daerah dapat menggunakan temuan ini sebagai pertimbangan untuk memetakan kegiatan investasi dan potensi penerimaannya. Adapun peningkatan kepatuhan, jumlah wajib pajak, dan efektivitas pemungutan tetap merupakan kemungkinan mekanisme yang memerlukan pengujian tersendiri (Pramanda et al., 2023).

Pengaruh PDRB Per Kapita terhadap Tax Ratio Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat

Hasil estimasi menunjukkan bahwa PDRB per kapita memiliki koefisien positif sebesar 0,002493 dengan nilai probabilitas 0,4034. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini belum memperoleh bukti statistik yang memadai mengenai hubungan PDRB per kapita dengan tax ratio setelah mempertimbangkan variabel lain dan efek tetap daerah dalam model. Berdasarkan kerangka kapasitas perpajakan, PDRB per kapita merepresentasikan salah satu dimensi kapasitas ekonomi yang berpotensi mendukung penerimaan pajak. Namun, kapasitas ekonomi yang lebih tinggi tidak identik dengan penerimaan pajak yang lebih besar secara proporsional terhadap PDRB. Dengan demikian, hasil yang tidak signifikan tidak serta-merta menolak relevansi kapasitas ekonomi, tetapi menunjukkan bahwa indikator tersebut belum menjelaskan variasi tax ratio secara meyakinkan dalam spesifikasi dan periode penelitian ini (Le et al., 2012).

Teori federalisme fiskal memberikan penjelasan bahwa peningkatan output ekonomi dapat berasal dari kegiatan yang hasil perpajakannya tidak seluruhnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Dalam kondisi tersebut, kenaikan PDRB per kapita tidak harus diikuti kenaikan tax ratio daerah. Selain itu, PDRB per kapita merupakan rata-rata nilai tambah per penduduk, bukan ukuran langsung pendapatan yang diterima atau kemampuan membayar pajak setiap individu. Oleh sebab itu, hubungan antara PDRB per kapita dan tax ratio perlu dianalisis melalui komposisi kegiatan ekonomi serta kesesuaiannya dengan kewenangan perpajakan daerah. Penjelasan tersebut merupakan kemungkinan teoretis atas hasil penelitian, bukan bukti bahwa keterbatasan kewenangan pajak menjadi penyebab pasti ketidaksignifikanan koefisien (Oates, 1999).

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 03 | November 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n3.9727

Hasil ini sejalan dalam hal ketidaksignifikanan dengan penelitian Pramanda et al. (2023), meskipun penelitian tersebut menggunakan tax effort sebagai indikator perpajakan. Temuan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak penting bagi penerimaan daerah. Sebaliknya, hasil penelitian mengarahkan perhatian pada perlunya membedakan peningkatan kapasitas ekonomi dari kemampuan mengonversinya menjadi penerimaan pajak. Implikasi kebijakannya adalah bahwa peningkatan PDRB per kapita perlu disertai pemetaan sektor pembentuk nilai tambah dan keterkaitannya dengan objek pajak daerah. Penelitian lanjutan juga perlu mempertimbangkan keterbatasan periode pengamatan dan variasi PDRB per kapita dalam masing-masing daerah sebagai alternatif penjelasan atas ketidakpastian estimasi (Pramanda et al., 2023).

Pengaruh Sektor Perdagangan dan Industri terhadap Tax Ratio Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat

Hasil estimasi menunjukkan bahwa kontribusi sektor perdagangan dan industri memiliki koefisien positif sebesar 0,049461 dengan nilai probabilitas 0,0133. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kontribusi gabungan kedua sektor berhubungan dengan peningkatan tax ratio dalam model penelitian. Kerangka kapasitas perpajakan menjelaskan bahwa potensi penerimaan tidak hanya berkaitan dengan besarnya perekonomian, tetapi juga dengan komposisi kegiatan ekonomi yang membentuknya. Perubahan komposisi sektoral dapat mengubah karakteristik transaksi, kegiatan usaha, dan penggunaan aset yang relevan bagi pemungutan pajak. Oleh karena itu, hubungan positif yang ditemukan mendukung argumentasi bahwa struktur ekonomi merupakan salah satu dimensi penting dalam menjelaskan variasi rasio penerimaan pajak daerah (Le et al., 2012).

Dalam perspektif federalisme fiskal, kontribusi perdagangan dan industri perlu dibedakan dari basis pajak yang secara langsung menjadi kewenangan kabupaten/kota. Besarnya nilai tambah kedua sektor tidak berarti seluruh aktivitasnya dapat dikenai pajak daerah. Hubungan positif dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai keterkaitan perkembangan struktur ekonomi dengan aktivitas yang berpotensi mendukung penerimaan daerah, baik melalui kegiatan utama maupun kegiatan turunannya. Penjelasan tersebut tetap bersifat interpretatif karena penelitian belum memisahkan jenis penerimaan pajak yang berkaitan dengan setiap sektor. Selain itu, penggunaan indikator gabungan membatasi kesimpulan pada kontribusi perdagangan dan industri secara bersama dalam satu variabel; hasilnya tidak membuktikan bahwa masing-masing sektor mempunyai pengaruh positif secara terpisah (Oates, 1999).

Temuan ini memberikan implikasi bahwa pengembangan sektor ekonomi perlu dihubungkan dengan pemetaan potensi penerimaan sesuai kewenangan daerah. Pemerintah kabupaten/kota dapat menelaah kegiatan usaha dan objek pajak yang berkembang bersamaan dengan meningkatnya kontribusi perdagangan dan industri. Akan tetapi, signifikansi koefisien tidak dapat dijadikan bukti langsung bahwa administrasi perpajakan telah efektif atau kepatuhan wajib pajak telah meningkat. Penilaian atas pemanfaatan potensi pajak memerlukan pengukuran kapasitas dan tax effort secara tersendiri. Dengan demikian, hasil penelitian mendukung pentingnya struktur ekonomi dalam analisis tax ratio, sementara efektivitas pemungutan tetap menjadi dimensi berbeda yang perlu diteliti lebih lanjut (Noviyanti & Zen, 2022).

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh investasi, PDRB per kapita, serta kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap tax ratio kabupaten/kota di Kalimantan Barat selama periode 2021–2025. Berdasarkan estimasi Fixed Effect Model, investasi berhubungan positif dan signifikan dengan tax ratio. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi berkaitan dengan peningkatan penerimaan pajak daerah relatif terhadap ukuran perekonomian. PDRB per kapita memiliki koefisien positif, tetapi tidak signifikan, sehingga penelitian ini belum memberikan bukti statistik yang memadai bahwa peningkatan kapasitas ekonomi rata-rata penduduk berkaitan dengan peningkatan tax ratio. Sementara itu, kontribusi gabungan sektor perdagangan dan industri berhubungan positif dan signifikan dengan tax ratio. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengembangan basis ekonomi dan komposisi sektoral relevan dalam

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

menjelaskan variasi tax ratio daerah, sedangkan peningkatan PDRB per kapita saja belum cukup menjadi indikator peningkatan rasio penerimaan pajak.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah kabupaten/kota disarankan menghubungkan kebijakan pengembangan investasi dengan pemetaan potensi pajak sesuai kewenangan daerah. Langkah yang dapat dilakukan meliputi pencocokan data perizinan dan realisasi investasi dengan basis data objek pajak, identifikasi kegiatan usaha baru yang telah memenuhi ketentuan perpajakan, serta pembaruan data objek pajak secara berkala. Pada sektor perdagangan dan industri, pemetaan perlu diarahkan pada kegiatan usaha dan aktivitas turunannya yang berkaitan dengan objek pajak daerah, sehingga pengembangan sektor ekonomi dapat diikuti pelayanan dan pemungutan yang lebih tepat sasaran. Pelaksanaannya perlu mengutamakan kepastian prosedur dan kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Hasil PDRB per kapita yang tidak signifikan menunjukkan bahwa pemerintah daerah sebaiknya tidak menggunakan pertumbuhan indikator tersebut sebagai satu-satunya dasar penetapan target penerimaan pajak. Target perlu mempertimbangkan komposisi sektor ekonomi, perkembangan objek pajak, dan realisasi penerimaan masing-masing jenis pajak. Efektivitas tindak lanjut dapat dievaluasi melalui ketercakupan pendataan objek pajak, kepatuhan pembayaran, dan perkembangan penerimaan per jenis pajak, dengan tetap memperhatikan perubahan kebijakan yang memengaruhi keterbandingan data antarperiode. Rekomendasi administratif ini merupakan langkah operasional yang dapat dievaluasi lebih lanjut, karena efektivitasnya belum diuji secara langsung dalam penelitian.

Penelitian selanjutnya disarankan memperpanjang periode pengamatan, memisahkan kontribusi sektor perdagangan dan industri, serta membedakan investasi berdasarkan jenis atau sektor tujuannya. Penambahan indikator administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan perubahan kebijakan penerimaan daerah juga diperlukan untuk menguji mekanisme yang mendasari hubungan tersebut. Pengembangan ini diharapkan dapat memperjelas bagaimana potensi ekonomi diterjemahkan menjadi penerimaan pajak dan menghasilkan rekomendasi yang lebih sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.

Referensi

Badan Pusat Statistik. (2025). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2021–2025. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2025). Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka 2025. Pontianak: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat.

Bahl, R. W. (1971). A regression approach to tax effort and tax ratio analysis. IMF Staff Papers, 18(3), 570–612. Sumber utama untuk membedakan tax ratio, kapasitas perpajakan, dan tax effort.

Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2014). Taxation and development: The weakest link? In J. Alm, J. Martinez-Vazquez, & M. Rider (Eds.), The challenges of tax reform in a global economy. New York: Springer.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2025). Data penerimaan pajak daerah kabupaten/kota. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2021). Basic econometrics (6th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Kuncoro, M. (2018). Perencanaan pembangunan daerah: Teori dan aplikasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Le, T. M., Moreno-Dodson, B., & Bayraktar, N. (2012). Tax capacity and tax effort: Extended cross-country analysis from 1994 to 2009. Policy Research Working Paper No. 6252. World Bank.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). Public finance in theory and practice (5th ed.). New York: McGraw-Hill.

Noviyanti, N., & Zen, F. (2022). Pengaruh penerapan sistem closed list dan penambahan jenis pajak daerah terhadap upaya pemungutan pajak daerah. Indonesian Treasury Review, 7(1), 89–100. https://doi.org/10.33105/itrev.v7i1.527.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. Journal of Economic Literature, 37(3), 1120–1149. https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120.

Pramanda, A., Sukmadilaga, C., & Yudianto, I. (2023). The determinants of local tax effort: Evidence from Indonesian regencies and municipalities. Journal of Accounting Auditing and Business, 6(1), 1–15.

Putri, A., & Rahman, A. (2024). Economic capacity and local government fiscal performance in Indonesia. Journal of Regional Economics Indonesia, 5(2), 115–128.

Rafsanjani, M., & Agustina, L. (2022). Determinants of tax ratio in Indonesian provinces. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 13(2), 145–160.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic development (13th ed.). Harlow: Pearson.

Sari, D., & Wahyudi, T. (2024). Investment and regional fiscal capacity: Evidence from Indonesian local governments. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 22(1), 55–70.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic development (13th ed.). Pearson.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License